

Menakar Tata Kelola Kepariwisata Rintisan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tambong

Novita Anggraeni N. Bahtiar¹, Sri Wilujeng², Hary Priyanto³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

¹²³novitaaisy0311@gmail.com, sriwilujeng426420@gmail.com, harysangabi@gmail.com

Diterima	06	January	2026
Disetujui	15	June	2026
Dipublish	30	June	2026

Abstract

Growing and developing tourism effectively and sustainably can have an impact on increasing village income and the welfare of village communities. However, pioneering village-based tourism is not easy. Collaboration is needed through an empowerment model so that local wisdom is maintained and respects the environment. The aim of this research is to describe and analyze pilot tourism governance through community empowerment programs in Tambong Village. Researchers apply qualitative descriptive methods according to the constructive and participatory model. Primary data comes from interviews, and secondary data comes from literature reviews and regulations relevant to the substance of the research. The conclusion of this research is that it is difficult for village governments to pioneer tourism because they do not yet have strategic, operational and technical village regulations. The recommendation expressed by this research is that the village government needs to guide and assist community institutions technically from the stage: government for the community, government with the community, and by the community.

Keywords: *Collaborative, Pilot Tourism, Empowering Quality*

Abstrak

metode penelitian, dan hasil penelitian. Menumbuh-kembangkan kepariwisataan secara efektif dan berkelanjutan bisa memberi dampak pada meningkatnya pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Meski demikian, merintis kepariwisataan berbasis desa tidak mudah. Perlu kolaborasi melalui model pemberdayaan agar kearifan lokal terjaga dan menghormati lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsi dan menganalisis tata kelola kepariwisataan rintisan melalui program pemberdayaan masyarakat di Desa Tambong. Peneliti menerapkan metode deskriptif kualitatif sesuai model konstruktif dan partisipatoris. Data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari hasil kajian studi pustaka dan peraturan yang relevan dengan substansi penelitian. Simpulan penelitian ini, sulitnya pemerintah desa merintis kepariwisataan karena belum memiliki peraturan desa yang bersifat strategis, operasional, dan teknis. Rekomendasi yang diungkapkan penelitian ini, pemerintah desa perlu membimbing dan membantu kelembagaan masyarakat secara teknis sejak tahap: pemerintah untuk masyarakat, pemerintah bersama masyarakat, dan oleh masyarakat.

Kata kunci: *Kolaboratif, Wisata Rintisan, Kualitas Pemberdayaan*



Pendahuluan

Era yang semakin kompetitif menyebabkan semua daerah mengembangkan segala potensi yang dimiliki, diantaranya lingkup kepariwisataan. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, memperoleh wewenang menjalankan otonomi daerah menjadi keuntungan besar dalam melakukan pembangunan dan mengembangkan daerah berdasarkan pada potensi dan sumber daya melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan berbasis alam, buatan, dan tradisi khususnya yang ada di desa. Berbagai inovasi dalam menumbuh-kembangkan pembangunan obyek dan daya tarik kepariwisataan berbasis potensi desa menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang sektor pariwisatanya berkembang pesat.

Penumbuh-kembangan kepariwisataan di desa, atau yang selanjutnya disebut desa wisata, perlu di dukung oleh program pemberdayaan masyarakat. Desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan dengan keseluruhan suasana yang asli dan khas baik dari kehidupan sosial-ekonomi, sosial-budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, kegiatan perekonomian yang menarik, serta memiliki potensi yang dapat dikembangkan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, serta kebutuhan wisata lainnya (Hadiwijoyo, 2012). Perlunya pemberdayaan masyarakat dalam desa wisata agar dapat meningkatkan kebutuhan manusia pada pariwisata, yang selanjutnya menjadikan sektor pariwisata punya peluang dan prospek yang besar dimasa mendatang. Sebagaimana pendapat Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan untuk bersenang-senang, keingin tahuan, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur.

Paradigma pengembangan desa wisata yang berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menempatkan masyarakat desa pada posisi sentral. Masyarakat desa tidak hanya ditempatkan sebagai sumber daya dan objek pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan. Diperlukan pemberdayaan masyarakat desa berbasis pariwisata agar bisa menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada di desa ketika menjadi obyek dan subyek wisata. Menurut Ulumiyah (2013:89), pembangunan desa bertujuan agar desa bisa menjadi wilayah yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian perlu ada upaya agar masyarakat desa bisa terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, diantaranya berbentuk pemberian jasa dan pelayanan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan.

Desa Tambong adalah salah satu wilayah administrasi berbentuk desa milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berada di Kecamatan Kabat. Desa Tambong belum punya fasilitas wisata dalam menyokong pengembangan destinasi kepariwisataan di Kabupaten banyuwangi. Dengan demikian diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Pemerintah Desa Tambong dengan berbagai komunitas dalam masyarakat yang berkepentingan untuk merintis destinasi wisata baru berbasis kekayaan dan keunikan yang ada di Desa Tambong. Kolaborasi tersebut untuk membentuk komunitas pemberdaya wisata, yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang merupakan salah satu bentuk kelembagaan informal yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang peduli untuk mengembangkan kepariwisataan di daerahnya.

Tabel 1. Wisata Rintisan Di Desa Tambong

Nama Rintisan	Klasifikasi
Taman Meru	Wisata Alam
Kali Tambong	Wisata Alam
Rafting	



Gredoğan	Tradisi
----------	---------

Sumber: Peraturan Bupati Banyuwangi
Nomor: 188/202/Kep/429.011/2021

Tidak berkembangnya potensi kepariwisataan di Desa Tambong sebagai dampak pasifnya Pemerintah Desa Tambong dalam membangkitkan kesadaran masyarakatnya terhadap potensi kepariwisataan. Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 1 tahun 2017 dijelaskan, setiap anggota masyarakat desa berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata. Dalam Ayat 2 pada Pasal 18 disebutkan, pemerintah desa berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa.

Implementasi suatu kebijakan adalah tahap krusial dari ditetapkannya kebijakan, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan (Priyanto, 2023). Sebab kebijakan yang tidak di implementasi akan sekedar impian atau rencana. Implementasi program rintisan pariwisata di Desa Tambong perlu dukungan jumlah sumber daya yang cukup, sekaligus implementor untuk saling komunikasi agar bisa mengetahui yang akan dikerjakan, baik perluang maupun hambatannya.

Pemerintah desa punya peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat, seperti memberikan keterangan atau penjelasan kepada masyarakat desa tentang program yang akan dilaksanakan, memberi persuasi atau ajakan dan dorongan untuk ikut serta berperan aktif mendukung pelaksanaan pembangunan desa (Laloma, 2012:2). Sesuai pendapat tersebut, meskipun Pemerintah Desa Tambong memiliki wewenang mengelola semua potensi yang ada dalam wilayah administrasinya, perlu kolaborasi dengan Pokdarwis sehingga bisa eksis menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang ada dilingkungannya ketika sudah menjadi obyek dan subyek wisata. Menurut Zakiyah &

Priyanto (2024), keberadaan organisasi bertindak sebagai suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja orang-orang dalam suatu kelompok kerja.

Artikel ilmiah ini mengulas tata kelola kepariwisataan rintisan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambong. Analisis dan hasil di dapat dari hasil pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian sebelumnya berguna bagi peneliti untuk mencari gambaran dan memperjelas kerangka berpikir dalam pembahasan suatu penelitian, sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Sintesis Artikel Ilmiah

Sitasi	Metode dan Fokus	Hasil
Pangestu & Suranto (2018)	- Kualitatif - Authority	Pemberian kewenangan pengelolaan pariwisata oleh pemerintah desa pada BUMDes dan Pokdarwis
Syaifudin & Ma'ruf (2022)	- Kualitatif - Support	Dukungan Pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan melalui desa wisata
Saskarawa ti, et al. (2023)	- Kualitatif - Oppurtinities	Partisipasi dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Adat Pinge sebagai upaya pemberdayaan



Sumber: Hasil Analisis (2024)

Berdasarkan hasil analisis pada 3 artikel tersebut, ditemukan aspek pendukung dan aspek penghambat yang berkaitan dengan model kolaboratif, keberadaan kebijakan, implementasi tugas pokok dan fungsi, dan anggaran. Keberadaan kendala berdampak tidak sesuai target, indikator dan strategi yang sulit mengukur keberlanjutannya. Diperlukan forum komunikasi atau koordinasi lintas stakeholders yang diinisiasi oleh pemerintah, agar menjadi wadah untuk mengawal komitmen stakeholders dan optimal (Priyanto & Hentika, 2024).

Kebijakan Kepariwisata

Kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Hal yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah juga merupakan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik dapat berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Pariwisata tidak lepas dari regulasi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelolanya. Kebijakan kepariwisataan merupakan regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu serta kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi (Goeldner & Ritchie, 2006).

Regulasi terkait kepariwisataan adalah

Undang-undang nomor 10 tahun 2009, yang menjelaskan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, serta pemerintah daerah. Adapun tujuan pariwisata disebut destinasi pariwisata, yaitu kawasan yang berada pada suatu wilayah yang terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling bersatu untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan.

Tujuan kebijakan kepariwisataan untuk menjamin negara dan daerah memperoleh manfaat besar dari kontribusi sosial budaya dan pertumbuhan ekonomi dari pariwisata. Kebijakan kepariwisataan bersifat dinamis, karena menyesuaikan pada penyempurnaan perkembangan pariwisata, dan harus efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan. Proses pembentukan kebijakan kepariwisataan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Perlu koordinasi dan dukungan berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka penyediaan pelayanan, perencanaan, pengembangan, dan manajemen kepariwisataan.

Desa Wisata

Potensi kekayaan alam dan keberagaman di setiap desa merupakan aset yang sangat menguntungkan karena menjadi peluang besar yang dapat dikelola dan dikembangkan. Tentunya dalam pengelolaan pada sektor pariwisata dalam desa juga harus melibatkan seluruh elemen dalam desa, dengan melibatkan keseluruhan elemen yang ada tentunya akan mempermudah dalam melakukan pengelolaan pariwisata. Banyaknya wisatawan pada masa sekarang yang lebih tertarik terhadap wisata alam yang ada didesa memungkinkan suatu desa membentuk sebuah program desa wisata.



Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan Desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata atau destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas yang disajikan dalam suatu Struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Berdasarkan undang-undang tersebut, desa wisata dikatakan sebagai sebuah karakteristik sebuah desa yang merupakan potensi asli yang dimiliki sebuah desa. Potensi tersebut bisa berupa kekayaan alam, maupun kondisi social dan budaya. Keragaman tersebut tentunya merupakan sesuatu yang belum tentu dimiliki desa lain sehingga menjadikan sebuah desa mempunyai ciri khas tersendiri.

Menurut Utomo (2017), terdapat 7 kriteria agar dapat menjadi desa wisata yaitu: adanya potensi poduk dan daya tarik, adanya dukungan sumber daya manusia, adanya motivasi dari masyarakat, adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, terdapat fasilitas pendukung kegiatan wisata, adanya kelembagaan yang mengatur kegiatan wisata, dan tersedianya area yang nantinya hendak dikembangkan menjadi destinasi tujuan wisata.

Metode Penelitian

Penelitian ini mempedomani pendekatan kualitatif yang diselarskan dengan prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya (Creswell dalam Shiddiqi, et al., 2024). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait potensi kepariwisataan rintisan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambong. Penelitian dilakukan di Desa Tambong Kecamatan Kabat pada tahun 2024. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang ditetapkan berdasarkan purposive sampling; data sekunder di dapat

melalui studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan subansi penelitian. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis pada data kualitatif, sehingga peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

Hasil dan Pembahasan

Merintis Kepariwisataaan Desa

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan secara komprehensif merupakan aspek penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Merintis Desa Tambong sebagai desa yang punya destinasi wisata mengandung maksud untuk mengembangkan wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada, tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi sumber daya desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur-unsur yang ada di dalam desa.

Hasil penelitian menjelaskan Desa Tambong punya potensi sumber daya alam yang bagus, khususnya terkait pemandangan alam yang alami, indah, dan asri, namun belum tersentuh program pengelolaan oleh Pemerintah Desa Tambong, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi desa tersebut (Hasil Wawancara).

Peneliti berpendapat, merintis pariwisata yang berkelanjutan dapat memanfaatkan sumber daya lingkungan dengan optimal, menghargai dan melestarikan keaslian warisan sosial-budaya masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi semua pemangku kepentingan. Keberadaan kebijakan kepariwisataan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui peraturan daerah dan keputusan bupati, hakekatnya sebagai dukungan agar secara berkelanjutan melindungi lingkungan dan mendistribusi



manfaat ekonomi dan sosial secara adil pada masyarakat, lembaga, dan organisasi yang terlibat. Oleh karenanya kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih strategis, operasional, dan teknis di tingkat desa, yaitu peraturan desa. Ketidakuasaan masyarakat pada program pemerintah sering disebabkan oleh hal-hal tidak adil, tidak beretika, tidak berkualitas, dan menutup partisipasi masyarakat (Priyanto & Noviana, 2018).

Selain 3 wisata rintisan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor: 188/202/Kep/429.011/2021 sebagaimana tersampaikan pada tabel 1, peneliti menemukan potensi wisata lain, sebagai berikut:

Tabel 3. Potensi Wisata Di Desa Tambong

Nama Potensi Wisata	Deskripsi
Kejaya Handicraft	Kerajinan pembuatan tas dari bahan tapos kelapa
Gunung Batu	Sejarah tambang batu dan geowisata
Persawahan	Agrowisata dan geowisata
Situs Tawang Alun	Napak tilas Prabu Tawang Alun (Raja terakhir Kerajaan Blambangan)

Sumber: Temuan Penelitian (2024)

Hasil temuan penelitian lapangan, Desa tambong memiliki beragam potensi yang bisa ditumbuh-kembangkan, dengan catatan ada kemauan masyarakat berkontribusi atau berpartisipasi dalam merintis kepariwisataan di Desa Tambong. Berdasarkan hasil analisis peneliti, kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan karena Pemerintah Desa Tambong jarang melakukan pembinaan dan/atau koordinasi dengan kelembagaan masyarakat, yang sebenarnya memiliki kapasitas sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kepariwisata berbasis

desa memberi dampak ekonomi suatu wilayah, diantaranya peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan pemerintah desa, peningkatan permintaan produk lokal dan peningkatan fasilitas untuk masyarakat (Febriana & Pangestuti, 2018).

Merintis pariwisata berkelanjutan perlu keterlibatan masyarakat agar menjaga sumber daya wisata dan menghormati lingkungan, sehingga dengan adanya pariwisata di Desa Tambong dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan keberhasilan pemerintah Desa terhadap tata kelola pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Sahyana (2019:157); Adisasmita (2006) menjelaskan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya pedesaan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan sumberdaya masyarakat terutama untuk mengubah perilaku masyarakat agar memiliki taraf hidup yang lebih berkualitas. Sumberdaya masyarakat berkualitas yang terbentuk dari pemberdayaan tentu bisa membuat Desa Tambong menumbuh-kembangkan kekayaan atau keunikan potensi yang ada. Karena prinsip keberhasilan desa merupakan hasil partisipasi masyarakat dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Banyaknya dampak positif yang diberikan oleh sektor pariwisata pada kehidupan masyarakat menjadikan industri pariwisata sebagai impian suatu pemerintah desa untuk ditumbuh-kembangkan dengan melibatkan semua unsur yang terkait. Jika pariwisata bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, maka ekonomi masyarakat akan membaik. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pariwisata desa adalah aspek terpenting dalam pembangunan. Subjek utama pengelola Desa Tambong adalah pemerintah Desa Tambong, yang merupakan sistem pemerintahan terendah yang



mempunyai andil dan berperan penting dalam sistem pemerintahan. Pemerintah harus terus berupaya mengentas masyarakat dari kemiskinan dengan cara mencukupi segala kepentingan masyarakat melalui kebijakan dan program-program yang bersifat langsung maupun tidak langsung (Priyanto & Noviana, 2023).

Pemerintah Desa Tambong harus memiliki program pemberdayaan masyarakat agar dapat menggali setiap potensi yang ada di Desa Tambong. Oroh (dalam Septriana, et al., 2024) menjelaskan, peran masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan pemerintah. Dengan pemberdayaan, tentu upaya kolaborasi dalam merintis destinasi wisata dapat menjadikan Desa Tambong lebih baik, bermanfaat, dan berkelanjutan.

Deskripsi terhadap pemberdayaan karena realitas partisipasi setiap unsur dalam merintis potensi kepariwisataan di Desa Tambong masih sangat minim. Pemerintah Desa Tambong perlu melakukan pengelolaan sumber daya manusia Desa Tambong melalui program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada dukungan kepariwisataan. Kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi komunitas, dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tujuan perintisan destinasi wisata di Desa tambong, meningkatkan pembangunan desa, menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, dan berkelanjutan.

Tata Kelola Potensi Desa Melalui Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah di tiap tingkatan pada dasarnya transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada masyarakat sehingga bisa lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif.

Tata kelola pemberdayaan masyarakat dalam

rangka merintis kepariwisataan di Desa Tambong dapat di implementasi dengan baik jika didalamnya memuat wewenang dan kekuasaan yang jelas dan terstruktur. Berdasarkan prinsip tersebut, peneliti mengasosiasi pemikiran Cook & Macaulay (1997) yang meramu pemberdayaan dengan istilah ACTORS yang memandang masyarakat sebagai subyek yang bisa melakukan perubahan dengan pola membebaskan seseorang dari kendali yang kaku serta memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab pada ide-ide, keputusannya, dan tindakannya. Pemberdayaan model ACTORS lebih ke arah pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain: mendorong adanya ketabahan, pendelegasian wewenang sosial, mengatur kinerja, pengembangan organisasi (lokal dan eksternal), penawaran kerjasama, komunikasi secara efisien, mendorong inovasi, dan penyelesaian masalah.

Tabel 4. Akronim ACTORS

Inisial	Makna
A	Authority (wewenang) dengan memberikan kepercayaan
C	Confidence and competence (rasa percaya diri serta kemampuan)
T	Trust (keyakinan)
O	Oppurtinities (kesempatan)
R	Responsibilities (tanggung jawab)
S	Support (dukungan)

Sumber: Cook dan Macaulay (1997)

Penggunaan konsep pemberdayaan model ACTORS dalam upaya merubah status dari merintis wisata di Desa Tambong agar tumbuh atau terkelola dan berkembang merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana, karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini, sehingga output yang diperoleh mampu berdayaguna secara optimal. Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka merintis kepariwisataan di Desa



Tambong dengan kerangka kerja ACTORS dapat di deskripsi sebagai berikut:

Pertama, authority (wewenang). Aspek ini menjelaskan bahwa kelompok atau masyarakat yang mendapat kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi milik mereka sendiri, agar merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka dan dapat menuju pada suatu hal yang lebih baik dari apa yang sebelumnya dilakukan (Cook & Macaulay, 1997).

Realitas temuan penelitian tentang potensi desa yang tidak dimaksimalkan, perlu di tangani secara efektif. Menurut peneliti, wewenang terkait upaya pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat melalui Pokdarwis, agar turut berupaya melakukan perubahan sesuai yang dikehendaki, serta agar menjadi lebih baik dari sebelum dilakukan.

Pemberian wewenang dari Pemerintah Desa Tambong pada masyarakat merupakan bentuk kepercayaan dalam menumbuh-kembangkan potensi kepariwisataan yang ada di Desa Tambong. Dengan kewenangan yang dimiliki, masyarakat dapat mengembangkan potensi dalam diri mereka sendiri agar berdampak positif pada lingkungannya. Meski demikian, pemberian wewenang dari pemerintah Desa Tambong pada masyarakat menjadi tantangan terbesar sekaligus menjadi peluang besar dalam mengembangkan pariwisata.

Menumbuh-kembangkan pariwisata melalui konsep pemberdayaan di wilayah Desa Tambong tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Desa tambong saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab keseluruhan unsur dan elemen yang ada di Desa Tambong. Peran terbesar dari pengembangan kepariwisataan dan pemberdayaan yaitu masyarakat sehingga pemerintah desa perlu memberikan wewenang kepada masyarakat untuk menjadi

bagian dari pengelolaan pengembangan pariwisata di Desa Tambong.

Kedua, confidence and competence (rasa percaya diri dan kemampuan). Cook & Macaulay (1997) menjelaskan jika hal ini sebagai upaya menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk merubah keadaan.

Temuan penelitian terkait kurang terkelolanya potensi yang ada, merupakan bukti kurangnya rasa percaya diri dan kemampuan semua pihak yang ada di Desa Tambong. Perlu dipahami, kepercayaan diri merupakan salah satu syarat esensial bagi individu untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas dalam mencapai keberhasilan. Wujud kepercayaan diri ditandai oleh rasa percaya pada kemampuan tiap individu. Meski kepercayaan diri sebagai suatu hal yang harus dimiliki setiap individu, tetapi tidak semua individu memiliki rasa percaya diri yang baik.

Dalam pandangan peneliti, tujuan program pemberdayaan agar masyarakat Desa Tambong punya rasa percaya diri sehingga mampu merintis potensi kepariwisataan di Desa Tambong. Tujuan tersebut sebagai penjelas jika rasa percaya diri sebagai bagian aspek kepribadian yang penting di setiap individu. Tanpa kepercayaan diri tentu bisa menimbulkan masalah. Sebaliknya, saat individu punya kemampuan yang baik, maka dapat mempengaruhi rasa percaya diri. Perlunya kolaborasi yang baik antara Pemerintah Desa Tambong dengan berbagai unsur dalam masyarakat adalah untuk menambah kepercayaan diri, sehingga menjadi penunjang dalam merintis potensi kepariwisataan di Desa Tambong, agar bermanfaat dan berkelanjutan.

Ketiga, trust (keyakinan). Dalam pemberdayaan perlu menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus mampu untuk



merubahnya (Cook & Macaulay, 1997). Keyakinan sebagai upaya pada individu dan kelompok tentang kesadaran potensi yang ada dalam diri sendiri sehingga, menciptakan kemampuan untuk dapat merubah keadaan diri dan lingkungannya menjadi lebih baik.

Temuan penelitian lapangan terkait minimnya destinasi wisata adalah tantangan Pemerintah Desa tambong dan masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan, meski pada satu sisi bahwa Desa Tambong memiliki berbagai potensi yang bisa dikelola dalam perspektif kepariwisataan.

Peneliti berpendapat, Pemerintah Desa Tambong perlu membentuk keyakinan pada masyarakat agar memiliki kemampuan menggali potensi diri, agar berkontribusi dalam rintisan pembangunan berbasis kepariwisataan. Keyakinan pada potensi diri tidak hanya berdasar pada diri masyarakat itu sendiri, tetapi juga karena dorongan pemerintah dan unsur pendukung lainnya, terlebih dengan terbentuknya kelompok atau kelembagaan masyarakat yang menunjang dalam merintis kepariwisataan.

Tahapan awal membentuk kelompok kerja dari masyarakat adalah membentuk Pokdarwis dan kelompok usaha. Kelompok tersebut yang terlibat saat perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam merintis kepariwisataan di Desa Tambong. Selain daripada itu, kelompok kerja tersebut diperuntukkan dan diharapkan menjadi penggerak masyarakat agar terlibat aktif dalam merintis kepariwisataan di Desa Tambong. Agar tepat sasaran dan sesuai maka pembagian tugas dari tiap divisi dalam organisasi, baik sumber daya pelaksana, keuangan serta sarana prasarana harus tertata dengan baik (Priyanto, 2018).

Keempat, oppurtinities (kesempatan). Sebagaimana pendapat Cook & Macaulay (1997), perlu memberikan kesempatan pada

masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri.

Penelitian lapangan menjelaskan ada upaya pemberian kesempatan dari Pemerintah Desa Tambong kepada masyarakat melalui pembentukan Pokdarwis, agar masyarakat menjadi subjek aktif dalam pembangunan yang mau terlibat menumbuh kembangkan potensi alam dan lingkungan di Desa Tambong untuk menjadi destinasi wisata.

Dalam pandangan peneliti, masyarakat memahami kebutuhan dan permasalahan yang di dihadapi. Dengan demikian program pemberdayaan Pemerintah Desa Tambong tersebut harus bertahap dan mengarah pada prinsip pembangunan desa, yaitu: dari, oleh, dan untuk masyarakat. Maknya masyarakat perlu mendapatkan pelatihan agar dapat merumuskan rencana dan melaksanakan pembangunan desa secara mandiri. Dengan kesempatan tersebut, masyarakat bisa berkontribusi maksimal sesuai dengan kelebihan dan kemampuan yang mereka miliki.

Pemberdayaan penting dilakukan karena masyarakat punya banyak potensi, baik dilihat dari sumber daya yang ada maupun dari sumber sosial budaya, yang bila digali dan disalurkan bisa menjadi energi besar untuk mengatasi berbagai tantangan ketika merintis kepariwisataan yang mensejahterakan dan berkelanjutan.

Kelima, responsibilities (tanggung jawab). Cook & Macaulay (1997) menjelaskan, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik. Tanggung jawab dalam merintis kepariwisataan di Desa Tambong berkaitan dengan tata kelola pemerintah desa yang didasarkan pada tanggungjawab sehingga



mencapai tujuan yang diharapkan.

Temuan penelitian terkait keberadaan potensi desa yang belum terkelola dengan baik harus segera tertangani. Peneliti berpendapat, tujuan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat, agar turut serta dalam menumbuh-kembangkan potensi Desa sebagai destinasi wisata. Karena tanggung jawab dalam mencapai keberhasilan terhadap rintisan pariwisata di Desa Tambong tidak sekedar tanggung jawab pemerintah desa saja, tetapi perlu kontribusi masyarakat dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan pemberdayaan dalam merintis destinasi wisata di Desa tambong dapat melalui program kegiatan yang mendorong kemampuan dan keterampilan sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, serta menghidupkan budaya dan kearifan lokal. Patut dipahami, kebijakan yang menunjang pemberdayaan dalam merintis destinasi wisata harus di implementasi dengan baik, benar dan mendapat kepercayaan masyarakat. Sebab sistem perumusan dan pengelolaan oleh pemerintah untuk memenuhi keinginan dan mencukupi kebutuhan masyarakat (Priyanto, 2024).

Keenam, support (dukungan). Cook & Macaulay (1997) menyampaikan, perlu ada dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai stakeholders yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak atau faktor.

Hasil penelitian lapangan menjelaskan Desa Tambong punya berbagai potensi unik yang sebenarnya bisa dikemas dalam bentuk destinasi wisata. Namun dengan minimnya program pengelolaan yang efektif dan

minimnya kesadaran masyarakat membuat potensi yang ada tersebut belum termanfaatkan dengan baik.

Peneliti berpendapat, pengoptimalan pada pemberdayaan sumber daya masyarakat Desa Tambong guna mengelola potensi desa yang terfokus pada pembangunan di sektor pariwisata. Meskipun telah terbentuk Pokdarwis dan kelompok usaha lainnya, namun Pemerintah Desa Tambong perlu berperan lebih aktif dalam membuat program rintisan kepariwisataan yang efektif dan strategis untuk di implementasi. Selain hal tersebut, perlu ada pemahaman bahwa dukungan setiap pihak yang terlibat dalam tujuan perintisan kepariwisataan di Desa Tambong merupakan aspek penting. Dukungan tidak hanya berkaitan tentang materiil, tetapi juga memerlukan dukungan langsung melalui subjek yang menjadi peran utama dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran pemerintah, masyarakat, dan stakeholders dalam merintis kepariwisataan merupakan kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya yang ada di Desa Tambong

Kesimpulan

1. Sulitnya Pemerintah Desa Tambong dalam merintis kepariwisataan karena belum memiliki peraturan desa yang bersifat strategis, operasional, dan teknis.
2. Pemerintah Desa Tambong jarang melakukan pembinaan dan/atau koordinasi pada kelembagaan masyarakat yang sebenarnya bisa memudahkan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya merintis kepariwisataan yang bertahap, mensejahterakan, dan berkelanjutan.



Rekomendasi

1. Kebijakan kepariwisataan yang dibentuk dan ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan bupati, hakekatnya perlu ditindaklanjuti dengan aturan lebih teknis dalam bentuk peraturan desa.
2. Pemerintah Desa Tambong perlu memberi bimbingan dan bantuan teknis pada kelembagaan masyarakat agar kontribusi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam upaya merintis kepariwisataan berangkat dari tahap: pemerintah desa melakukan untuk masyarakat, lalu pemerintah desa bersama masyarakat, dan terakhir langsung oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kecamatan Kabat Dalam Angka 2021*. BPS Banyuwangi.
- Cook, Sarah. & Steve Macaulay. (1997). *Perfect Empowerment*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Febriana, YE. & Pangestuti, E. (2018). *Dampak Pengembangan Kepariwisata Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi Dan Sosial Budaya Lokal Masyarakat (Studi Pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis 61 (4).
- Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. B. (2006). *Tourism: Principles, practices, philosophies*. John Wiley & Sons.
- Hadiwijoyo, Surya Sakti. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu Ismayanti.
- Laloma, Alden. Julien Humapi, Martha Ogotan. (2012). *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik, 3 (046).
- Meyers, Koen. (2009). *Pengertian Pariwisata*. Jakarta: Unesco Office.
- Pangestu, Rizky Aji. & Suranto. (2018). *Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*. Res Publica, 2 (1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 1 tahun 2017, tentang: *Desa Wisata*.
- Peraturan Bupati Banyuwangi nomor: 188/202/Kep/429.011/2021, tentang: *Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Banyuwangi*.
- Priyanto, Hary. & Nana Noviana. (2018). *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015*. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 4 (1). DOI: 10.31947/jakpp.v4i1.5900.
- Priyanto H, & Hentika NP. (2024). *Collaborative Penta Helix Stakeholders Dalam Pembangunan Inklusi Yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang*



- Disabilitas*. Majalah Ilmiah Dian Ilmu. 24(1): 67-87. Doi: 10.37849/midi.v24i1.404.
- Priyanto, H. (2023). *The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program*. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 15(2), 1007-1018. Doi:10.37680/qalamuna.v15i2.3788.
- Priyanto, H. (2024). *Public Service Quality in Banyuwangi Distric: A Study in Welfare Perspective*. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 8(1). Doi: 10.24198/jmpp. v8i1.48657.
- Priyanto, H. (2018). *Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi*. WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 7(1). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03;
- Priyanto, H., & Noviana, N (2023). *Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi*. Majalah Ilmiah Dian Ilmu, 22(2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330;
- Sahyana, Yana. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 157 (81). Doi: 10.33701/jt.v8i2.618.
- Saskarawati, Ni Putu Ayu. I Kadek Artha Prismawan., & Dewa Kiskenda Erwanda. (2023). *Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal Di Desa Wisata Adat Pinge Tabanan Bali*. MSJ: Majority Science Journal, 1(1), 01–07. DOI: 10.61942/msj.v1i1.2.
- Septriana RV, Priyanto H, Vitasari L. (2024). *Quality of Representation Women Legislators in the Manifestation of Public Policy Formation in Banyuwangi: Uthopis or Prosperity?* JOELS: Journal of Election and Leadership. 5(2): 161-171. Doi:10.31849/joels.v5i2.22406.
- Shiddiqi, Izzul Haque Ash., Leni Vitasari, & Hary Priyanto. (2024). *Strategi Komunikasi Calon Legislatif Muda Pada Pemilu DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024*. Nusantara Hasana Journal, 4(3), 64–77. Doi: 10.59003/Nhj.V4i3.1199
- Syaifudin, Moch Yusuf. Muhammad Farid Ma'ruf. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)*. PUBLIKA Jurnal Adminisrasi Negara, 10 (2). DOI: 10.26740/publika.v10n2.p365-380.
- Ulumiyah, Ita. (2013). *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1 (5).
- Utomo, Selamat Joko. & Bondan Satriawan. (2017). *Strategi Pengembangan Desa Wisata Di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*. Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi, 11 (2). DOI: 10.21107/nbs.v11i2.3381.
- Zakiyah, I. H., & Priyanto, H. (2024). *Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu*



*Pemberdayaan Efektif atau
Eksistensi Proyek Pemerintah Desa?*
Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu, 6(1),

2715-3339.
10.37849/mici.v6i1.406.

Doi:

